

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 November 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BASO RAHMANUDDIN**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **401267**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.725.000.000
1. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah Seluas 435 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 925.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000		
4. Tanah Seluas 852 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
5. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	200.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH MOPEN/MINI BUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1,5 E M CVT/MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	606.130.064
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	70.117.511
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.601.247.575



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.601.247.575

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.